

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Secara sistem, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pengertian demokrasi sendiri yaitu pemerintahan yang ada ditangan rakyat atau oleh rakyat¹. Didalam sistem pemerintahan yang demokratis salah satu buktinya adalah adanya partai politik. Kemudian setelah partai politik tentu adanya ketentuan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan anggota legislatif. Di Indonesia pemilihan umum untuk Presiden dan DPR pelaksanaannya tidak serentak, pada pemilu tahun 2019 inilah pemilu dilaksanakan serentak untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Dalam hal ini rakyat diberikan kekuasaan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat secara langsung dan serentak².

Salah satu institusi yang dipilih langsung oleh rakyat yang nantinya berperan penting sebagai wakil rakyat adalah anggota DPRD Kabupaten. DPRD merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pengawas, yakni membuat peraturan daerah, menyusun anggaran bersama pemerintah daerah dan mengawasi terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam

¹Massa Djafar, *Krisis politik dan proposisi demokratisasi* (Jakarta: Bumi Aksara,2015) hlm. 29.

²Miftah Thoha, *Birokrasi politik dan pemilihan umum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group,2014) hlm. 114.

menyelenggarakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional yang dilaksanakan di daerah³.

Meskipun DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, tapi kewenangan DPRD tidak seperti kepala daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD Kabupaten dibatasi hanya menjalankan fungsi yang sudah diatur dalam undang-undang⁴.

Fungsi dan wewenang DPRD diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi⁵, yaitu:

- a. Fungsi legislasi, merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan diselenggarakan.
- b. Fungsi Penganggaran, merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator dalam pengusulan APBD ajuan pemerintah daerah.
- c. Fungsi pengawasan, merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan

³Rudi Santoso, dkk. Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1 2021.

⁴Agus Suharyono, *DPRD Tentang Tugas dan Fungsi* (Jakarta: Deepublish, 2015), hlm. 14

⁵*Opcit. Hlm. 84-86.*

rencana yang sudah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Anggota DPRD Kabupaten dipilih melalui kegiatan pemilihan legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga orang-orang yang terpilih sebagai anggota DPRD sudah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mewakili suara rakyat. Keanggotaan DPRD Kabupaten sudah diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- 2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Dalam pemilihan legislatif, secara umum memiliki dua sistem yakni sistem proporsional dan sistem nonproporsional. sistem proporsional merupakan sistem yang menerapkan prinsip *multi-member constituency* atau dalam satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil. Sedangkan sistem nonproporsional merupakan sistem yang menerapkan prinsip *single-member*

constituency atau dalam satu daerah pemilihan memilih satu wakil saja⁶. Sistem pemilu di Indonesia menerapkan sistem proporsional. Maka dari itu setiap daerah pilihan memilih beberapa orang wakil.

Sesuai dengan yang terjadi di Kabupaten Batanghari, dari setiap dapil terdapat beberapa orang wakil. KPU Kabupaten Batanghari mengumumkan Anggota DPRD terpilih Kabupaten Batanghari sebanyak 35 orang yang tersebar di IV Daerah Pilihan yang berasal dari 10 partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, PDI-Perjuangan, Golkar, NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Demokrat⁷.

Daerah Pilihan I meliputi Kecamatan Muara Bulian dan Maro Sebo Ilir. Daerah Pilihan II meliputi Kecamatan Pelayung dan Bajubang. Daerah Pilihan III meliputi Kecamatan Muara Tembesi dan Bathin XXIV. Dan Daerah Pilihan IV meliputi Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu. Dengan jumlah 38 kursi dari 10 partai politik, namun karena 3 caleg melakukan PAW maka tersisa 35 kursi dari 10 partai politik⁸. Sebagaimana pada tabel berikut adalah nama-nama anggota DPRD Kabupaten Batanghari yang terpilih pada pemilihan legislatif 2019 yang berdasarkan partai politik dapat dilihat pada tabel 1 serta komposisi DPRD di Kabupaten Batanghari pada tabel 2.

⁶Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 109.

⁷https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Batanghari. Diakses tanggal 2 agustus 2023 pukul 14.25.

⁸<http://bitly.ws/PXVr>. diakses tanggal 2 agustus 2023 pukul 19.34.

Tabel 1

Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Batanghari Serta Jumlah Perolehan Suara Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019

No.	NAMA	PARTAI	DAPIL	SUARA SAH
1.	Patoni, S.E.	PKB	1	1.658
2.	Banu Aziz	PKB	2	1.668
3.	Ilhamsyah	PKB	3	1.821
4.	Ilhamuddin, S.Pd.I	PKB	4	2.568
5.	Najamuddin,S.E.	Gerindra	1	1.037
6.	Suip, S.P.	Gerindra	2	1.222
7.	Drs. Aminuddin	Gerindra	4	2.350
8.	Syafriandi	PDI-P	1	1.539
9.	IR. Ibrahim	PDI-P	2	1.727
10.	Purwanto, S.IP.	PDI-P	3	1.530
11.	Hartono	Golkar	1	773
12.	Mardiana	Golkar	1	1.013
13.	M. Amin Z.	Golkar	2	2.158
14.	Muhammad Jaafar, S.H.	Golkar	4	3.286
15.	Sirojuddin, S.E.	Golkar	4	2.620
16.	Aminah, S.E.	NasDem	1	1.334

17.	Deni Setiawan,S.H.	NasDem	2	1.427
18.	Risno, S.H.	NasDem	3	896
19.	Marjani, S.H.	NasDem	4	1.206
20.	Adison, S.Pd.	PKS	1	1.132
21.	Asmawi	PKS	2	1.627
22.	Muhyi	PKS	2	1.666
23.	Yoghie Verly Pratama	Perindo	2	1.386
24.	Muhammad Zaki	PPP	1	1.480
25.	Turisman	PPP	2	866
26.	Minarti, S.H.	PPP	3	1.954
27.	Tarmizi	PPP	4	1.309
28.	Hermayati Rosari, S.E.	PAN	1	2.159
29.	Azizah, S.E.	PAN	2	2.666
30.	Muhammad Zen	PAN	2	2.341
31.	Anita Yasmin, S.E.	PAN	3	2.734
32.	Salim	PAN	4	1.579
33.	Quzwaini	Demokrat	1	1.821
34.	Febri Nurhalimah	Demokrat	3	1.088
35.	Adi Susanto	Demokrat	3	2.283

Sumber Data : KPU Kabupaten Batanghari

Tabel 2
Komposisi DPRD Kabupaten Batanghari tahun 2019

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	Perolehan Suara
1.	PKB	4 kursi	19.527
2.	Gerindra	3 kursi	14.376
3.	PDI-P	3 kursi	12.281
4.	Golkar	5 kursi	23.571
5.	NasDem	4 kursi	14.174
6.	PKS	3 kursi	11.937
7.	Perindo	1 kursi	6.687
8.	PPP	4 kursi	13.975
9.	PAN	5 kursi	23.878
10.	Demokrat	3 kursi	12.416

Sumber Data : KPU Kabupaten Batanghari

Berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Batanghari memastikan PAN merupakan pemenang dalam pemilihan legislatif dengan perolehan 5 kursi dan

total 23.878 suara⁹. Hal ini menjadikan PAN kembali berkuasa setelah berhasil memenangkan pemilihan legislatif pada periode sebelumnya yaitu pada periode 2014. Karena PAN sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Batanghari, partai PAN memiliki kesempatan untuk menjadikan salah satu anggota partainya yang terpilih sebagai ketua DPRD Kabupaten Batanghari.

Terdapat fakta menarik bahwa Ketua DPRD yang terpilih dari fraksi PAN merupakan anggota legislatif perempuan muda yang belum berpengalaman dan baru terjun ke ranah politik. Namun sudah bisa memiliki kepercayaan dari masyarakat dan berhasil menang dengan perolehan suara terbanyak di Daerah Pilihan yaitu Dapil III Batanghari. Berikut perolehan suara pada pemilihan legislatif Kabupaten Batanghari Dapil III tahun 2019.

Tabel 3

Perolehan Suara Daerah Pilihan III Kabupaten Batanghari tahun 2019

No.	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1.	Ilhamsyah	1.821
2.	Purwanto, S.IP.	1.530
3.	Risno, S.H.	896
4.	Minarti	1.954
5.	Anita Yasmin, S.E.	2.734

⁹<https://www.antaraneews.com/berita/860048/pan-puncaki-perolehan-suara-pemilu-2019-dibatanghari>. Diakses tanggal 2 agustus 2023 pukul 12.30.

6.	Camelia Puji Astuti, S.Sn., M.A.	2.314
7.	Adi Susanto	2.283

Sumber Data : KPU Kabupaten Batanghari

Pada tabel 3 menunjukkan legislatif muda tersebut adalah Anita Yasmin yang memperoleh suara terbanyak di Daerah Pilihan III dari fraksi PAN. Bahkan diantara caleg partai PAN, Anita Yasmin memperoleh suara terbanyak kedua dari 5 orang caleg yang berhasil terpilih. Hal ini menghantarkan beliau menjadi Ketua DPRD Kabupaten Batanghari dikarenakan pemilik suara terbanyak pertama yaitu M. Mahdan melakukan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) yakni mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati bersama Yunninta Asmara. Padahal dibandingkan caleg lain secara pengalaman politik masih minim karena periode ini adalah periode pertama Anita Yasmin terjun ke DPRD Kabupaten Batanghari¹⁰.

Anita Yasmin tidak memiliki pengalaman di ranah politik, beliau hanya memiliki popularitas sebagai seseorang yang aktif didalam dunia jurnalistik sebagai editor dan penyiar atau presenter berita pada salah satu TV lokal di Jambi. Kemudian paras dan penampilannya juga menjadi alasan bagaimana beliau bisa memiliki popularitas tersebut hingga memiliki media sosial yang terverifikasi. Anita Yasmin juga bukan merupakan kader yang berasal dari keluarga politisi, orang tuanya adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Anita Yasmin berhasil resmi menjadi ketua DPRD Kabupaten Batanghari

¹⁰<https://bitly.ws/PXUU>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023 pukul 12.25.

di usia 24 tahun, hal ini menjadikan Anita Yasmin sebagai ketua DPRD termuda se-indonesia¹¹.

Tentunya ini merupakan sebuah pencapai diluar prediksi bagi seseorang yang tidak memiliki pengalaman dan masih baru berkecimpung dalam ranah politik. Karna biasanya keberhasilan calon legislatif dalam merebut hati para pemilih tidak terlepas dari jangka waktu caleg tersebut berkecimpung dalam dunia politik, dengan begitu lebih memudahkan untuk mencapai kemenangan karena sudah dikenal oleh masyarakat, lebih berpengalaman dan memiliki daya tarik atas image positif bagi dirinya maupun partai politik¹². Berbeda dengan caleg muda, Kemenangan caleg muda merupakan fenomena yang langka. Kelangkaan ini dikarenakan caleg muda belum memiliki reputasi dalam politik yang memadai jika dibandingkan dengan caleg yang lebih berpengalaman. Apalagi seorang perempuan yang memang terkesan sulit untuk menang dengan mudah di pemilu¹³. Tentunya dalam hal ini Anita Yasmin menggunakan strategi yang pas untuk meyakinkan masyarakat bahwa beliau bisa layak dipercaya dan menang.

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yang pertama adalah penelitian Akbar Abadi dengan judul “Kekuatan dan Strategi Politik Andi Hikmawati Kumala Idjo Pada Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Gowa” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang kekuatan dan strategi politik Andi Hikmawati yang telah

¹¹<https://gpriority.co.id/anita-yasmin-dari-jurnalis-menjadi-ketua-dprd-batanghari/>. Akses tanggal 2 Agustus 2023 pukul 13.45.

¹²Yusri. 2016. Strategi Caleg Muda Dalam Meraup Suara Pemilih Pemula (Studi Kasus Kemenangan Syauqi Futaqi Dari Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Bireuen). *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

¹³*Ibid.*

terpilih sebanyak 3 periode di daerah pilihannya, yang kemudian berfokus pada strategi dan pengaruh politiknya¹⁴.

Persamaan penelitian Akbar Abadi dan penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi dalam sebuah kontestasi politik. Perbedaannya terletak pada objeknya, dimana objek penelitian Akbar Dwi adalah caleg yang sudah terpilih selama 3 periode dan sudah memiliki pengalaman, sedangkan objek penelitian ini adalah Anita Yasmin seorang legislatif perempuan yang masih muda dan belum memiliki pengalaman.

Penelitian yang kedua adalah penelitian Karina dengan judul “Strategi Pemenangan Irwandi Burhan Dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Bone”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang strategi pemenangan Irwandi dipengaruhi oleh besarnya modal ekonomi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga dengan mudah bisa mendapatkan hati masyarakat¹⁵.

Persamaan penelitian Kirana dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi pemenangan dalam pemilihan legislatif tahun 2019, sedangkan perbedaannya pada objek dan lokasi penelitiannya. Penelitian Kirana objeknya adalah caleg dengan modal ekonomi dan lokasi penelitiannya di DPRD Kabupaten Bone, sedangkan penelitian ini objeknya adalah legislatif perempuan yang masih muda dan lokasinya adalah Dapil III Kabupaten Batanghari.

¹⁴Akbar Abadi. 2021. Kekuatan dan Strategi Politik Andi Hikmawati Kumala Idjo Pada Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

¹⁵Karina Warda. 2022. Strategi Pemenangan Irwandi Burhan Dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Bone. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemenangan Anita Yasmin Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana strategi pemenangan Anita Yasmin dalam pemilihan legislatif tahun 2019?
2. Apa saja faktor yang mendasari keterpilihan Anita Yasmin sebagai ketua DPRD di Kabupaten Batanghari periode 2019-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemenangan Anita Yasmin dalam pemilihan legislatif tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mendasari keterpilihan Anita Yasmin sebagai ketua DPRD di Kabupaten Batanghari periode 2019-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini, adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik, khususnya tentang strategi pemenangan Anita Yasmin dalam pemilihan legislatif.

Selain itu dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas atas strategi kemenangan Anita Yasmin dalam pemilihan legislatif tahun 2019.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Teori Marketing Politik

Marketing politik cenderung dipahami sebagai pengadopsian metode marketing politik dalam bidang ilmu politik. Secara definisi marketing politik ini merupakan kegiatan melakukan penekanan dalam menggunakan pendekatan dan metode marketing yang gunanya untuk membantu partai politik dan para politikus agar lebih efektif dan efisien dalam membangun hubungan dua arah dengan masyarakat dan konstituen dan masyarakatnya. Hal ini didefinisikan secara luas sebagai kontak fisik dalam masa kampanye hingga dengan komunikasi tidak langsung melalui media¹⁶.

Strategi marketing politik mengajarkan partai untuk dapat mendiferensiasikan produk dan image politiknya melalui proses marketing politik. Ada 4 bauran marketing dalam dunia politik, yaitu¹⁷:

1. Produk (*product*)

Produk terbagi dalam 3 kategori dengan mengacu pada platform partai yang berisikan konsep identitas ideologi dan program kerja,

¹⁶ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm. 128.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 200-208.

catatan tentang hal hal yang dilakukan partai politik di masa lalu untuk memberikan kontribusi pembentukan produk politik dan, karakteristik personal sebagai sebuah simbol atau mempunyai kredibilitas sehingga menaikkan citra partai.

Produk yang ditawarkan institusi politik merupakan sesuatu yang kompleks, dimana pemilih akan memperoleh hasilnya setelah sebuah partai atau kandidat terpilih. Arti penting sebuah produk politik juga tidak semata-mata hanya ditentukan oleh karakteristik produk itu sendiri.

Produk utama dari sebuah institusi atau kandidat adalah platform yang berisikan konsep, identitas ideologi dan program kerja. Selain itu, hal yang telah dilakukan partai dimasa lalu berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. Kandidat menjual produk politiknya yang terkait dengan sistem nilai, yang isinya terkandung janji dan harapan akan masa depan. Tetapi memang hasilnya tidak bisa langsung tercapai namun lebih bisa dinikmati dalam jangka panjang.

2. Promosi (*promotion*)

Promosi yang dimaksud disini yaitu berhubungan dengan program kerja yang ditawarkan partai kepada publik melalui pesan media baik media cetak televisi maupun radio. Sebenarnya promosi sebaiknya tidak hanya dilakukan dimusim kampanye belaka. Aktivitas promosi harus dilakukan secara terus-menerus dan permanen dan tidak hanya terbatas

pada periode kampanye saja. Sementara kalangan menyebut cara ini sebagai '*nyolong start*'.

Dengan demikian, publik akan selalu merasakan kehadiran institusi politik atau kandidat tersebut karena masyarakat akan berfikir bahwa institusi politik atau kandidat tersebut memperhatikan, menampung dan berusaha memecahkan masalah yang dihadapi. Hal ini penting dilakukan untuk membangun kepercayaan publik dan menjadi pelayan publik perlu ditumbuhkan dalam interaksi bersama masyarakat.

3. Harga (*price*)

Harga disini mencakup dari aspek ekonomi psikologis sampai dengan citra nasional. Harga dalam pengertian ekonomi meliputi semua biaya yang dikeluarkan oleh institusi politik selama masa kampanye, harga dalam pengertian psikologis mengacu pada apakah pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis agama pendidikan dari seorang kandidat, harga dalam pengertian citra nasional sehubungan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut memberikan citra positif bagi suatu bangsa atau negara dan bisa menjadi suatu kebanggaan nasional atau tidak.

Suatu institusi politik berusaha untuk meminimalisasi harga produk politik (minimalisasi resiko) mereka untuk memperoleh dukungan publik. Sebab pemilih akan memilih partai atau kontestan yang memiliki resiko atau harga yang relatif paling kecil.

4. Penempatan (*Place*)

Penempatan yang dimaksud berkaitan dengan distribusi yang dilakukan oleh suatu institusi politik dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih atau calon pemilih melalui segmentasi publik.

Pemilihan daerah mana yang perlu dikunjungi merupakan suatu permasalahan yang tidak sederhana. Karena perlu dipertimbangkan apakah penyampaian produk politik cukup melalui media atau harus datang dan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat.

Marketing politik juga dikembangkan oleh para politisi dan kandidat dalam merespon perkembangan terbaru teknologi komunikasi¹⁸. Marketing politik didefinisikan sebagai kombinasi penerapan ilmu marketing pemasaran dan penerapan ilmu politik sebagai subjek akademis¹⁹.

Marketing politik juga mengajarkan supaya kandidat dan parpol mampu mendeskripsikan produk politik secara jelas melalui visi, misi dan program yang ditawarkan. Untuk memenangkan sebuah pemilu, seorang kandidat harus mengetahui permasalahan mendasar dari masyarakat²⁰. Marketing politik juga didefinisikan penerapan konsep dan metode marketing kedalam dunia politik²¹. Marketing diperlukan untuk menghadapi persaingan dalam memperebutkan suara.

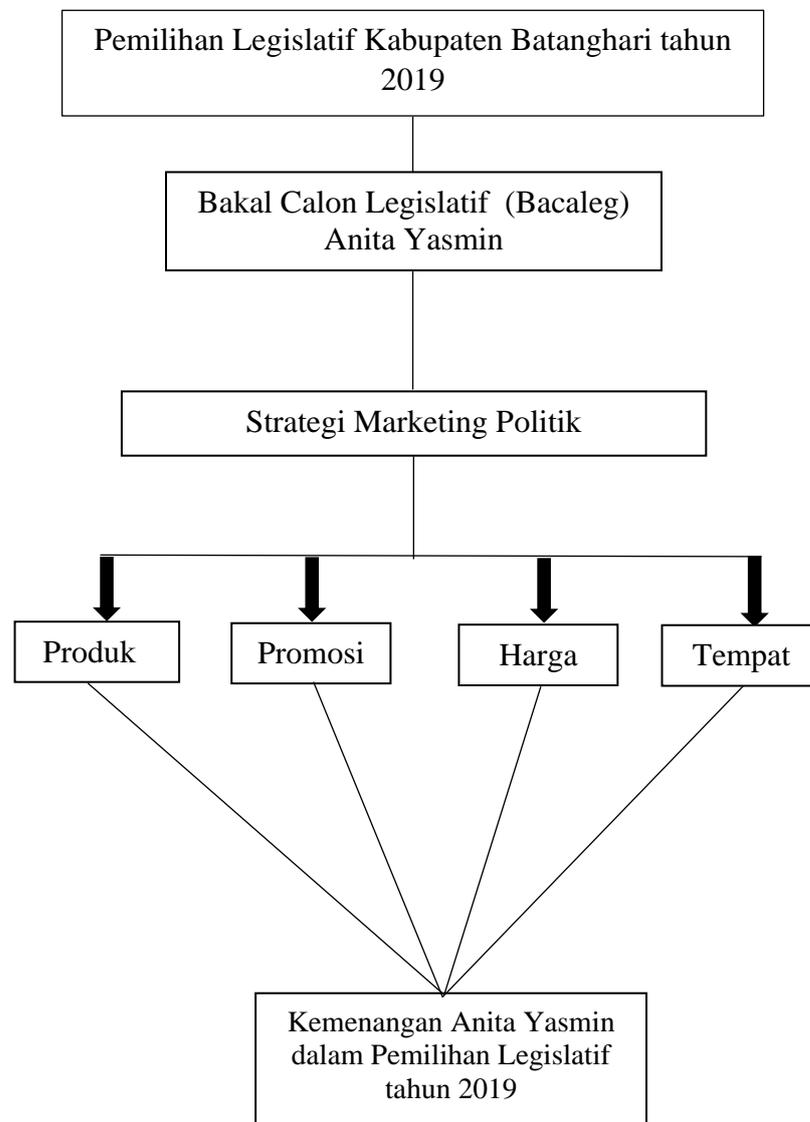
¹⁸ Nyarwi Ahmad, *Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik* (Yogyakarta: Pustaka Zaman, 2012) hlm. 347.

¹⁹ Adman Nursal, *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR DPD Presiden* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 8.

²⁰ Sanjaya, R. Pemasaran Politik Caleg Pendatang Baru Dalam Pemilu (Studi Kasus Wardi Ningsih Caleg PAN Dapil I Kabupaten Lamandau). *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 1 2017 hal 103-112.

²¹ Haroen, *Personal Branding Kunci Kesuksesan di Dunia Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

1.6. Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka tersebut, maka dapat dilihat Anita Yasmin menjadi bacaleg pada tahun 2019. Secara teori, strategi marketing politik menggunakan 4 pendekatan yaitu produk, promosi, harga dan tempat untuk melihat dan membahas bagaimana strategi pemenangan dari Anita Yasmin pada pemilihan legislatif tahun 2019.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan terkait strategi pemenangan Anita Yasmin dalam pemilihan legislatif agar hasil dari penelitian ini lebih detail dan akurat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang khas meneliti permasalahan sosial dan kemanusiaan. Peneliti menggambarkan satu kesatuan yang kompleks, menganalisis kata-kata, melakukan report pandangan detail dari para informan dan melaksanakan studi tersebut dalam lingkungan yang alami²².

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan lokasi dimana peneliti melakukan penelitiannya. Penentuan lokasi yang tepat sangat diperlukan guna mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi Dapil III yaitu di Kecamatan Muara Tembesi dan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut adalah daerah pilihan Anita Yasmin pada pemilihan legislatif tahun 2019.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah strategi pemenangan Anita Yasmin dalam pemilihan legislatif tahun 2019.

²²Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 415.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari²³:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari sumber asli atau informan untuk mendapatkan data atau informasi yang factual. Sumber data primer didalam penelitian ini merupakan informan yang menguasai dan memahami terkait strategi Anita Yasmin dalam pemilihan legislatif tahun 2019.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu bahan pendukung untuk memudahkan penelitian. Data sekunder dapat bersumber dari buku buku, jurnal/skripsi dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu teori dari buku, jurnal/skripsi, dan data perolehan yang bersumber dari KPU Batanghari.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling atau sang peneliti memilih individu dan tempat untuk diteliti, karna dalam teknik ini menggambarkan secara spesifik pemahaman tentang permasalahan riset dan fenomena yang sentral²⁴.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid. hlm. 418*

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka informan yang akan di pilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang tentunya memahami terkait strategi pemenangan Anita Yasmin dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Berikut adalah informan dalam penelitian ini.

Tabel 4
Nama-Nama Informan

NO.	NAMA INFORMAN	JABATAN
1.	Anita Yasmin, S.E.	Ketua DPRD Kabupaten Batanghari
2.	Sasmi	Sekretaris DPD PAN Batanghari
3.	Erik	Tim Pemenangan
4.	Harun	Tokoh Masyarakat Kampung Baru
5.	Sutiono	Kepala Desa Pelayangan
6.	Bani	Sekretaris Desa Sungai Pulai
7.	Iis	Sekretaris Desa Pematang V Suku
8.	Sabiin	Ketua BPD Desa Tanjung Marwo

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan 2 tahap²⁵, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan bertanya, mendengar dan melihat secara mendalam namun tidak terstruktur. Teknik wawancara dilakukan untuk dapat melakukan sesi tanya jawab secara langsung mengenai strategi pemenangan Anita Yasmin dalam pemilihan legislatif tahun 2019.

b. Dokumentasi

Peneliti menganalisis dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan selama proses penelitian guna mendapatkan data yang akurat dengan metode pengambilan berupa gambar dan data-data tertulis yang mendukung keabsahan data.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi²⁶:

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data perlunya dilakukan pemilihan data yang relevan agar dapat menjadi jawaban dari pertanyaan dalam penelitian, karna data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi adalah data mentah yang didapatkan dari lapangan. Kemudian setelah data-data tersebut selesai dipilih, selanjutnya data tersebut

²⁵*Ibid. hlm. 1*

²⁶*Ibid. hlm. 418*

disederhanakan dengan mengambil data pokok yang dapat digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Dalam tahap penyajian data, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Kemudian setelah data secara rinci disajikan, maka selanjutnya data tersebut dibahas.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuannya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara singkat namun jelas.

1.7.8. Keabsahan Data

Triangulasi merupakan suatu pendekatan yang menggunakan beragam sumber, metode, peneliti dan teori agar dapat menyediakan bukti pendukung yang dipergunakan untuk validasi. Biasanya dalam proses ini diperlukan bukti kuat yang berasal dari sumber yang beragam²⁷.

Triangulasi dengan sumber data perlunya dilakukan pengecekan data berupa proses wawancara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan tentang hal yang sama dalam waktu yang berbeda²⁸.

²⁷*Ibid. hlm. 419*

²⁸*Ibid.*

